

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya memberdayakan daerah di Indonesia perlu usaha yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait dengan sumber daya yang dikelola, potensi, dan prioritas di daerah tersebut. Hal ini, tidak terlepas dari kewenangan pemerintah dalam mengelola keuangan yang seutuhnya dipegang oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat, itulah disebut sebagai otonomi daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Oleh sebab itu, adanya akuntansi daerah yang baik untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan bagi pemerintah daerah.

Untuk menunjang pengelola keuangan yang lebih baik, pemerintah memberlakukan reformasi dalam mengelola keuangan di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Berdasarkan undang-undang tersebut, Keuangan Negara adalah seluruh kewajiban dan hak suatu negara yang dinilai dengan uang yang dapat menjadi milik negara. Kemudian pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkolaborasi dalam melaksanakan dan mengelola keuangan berdasarkan undang-undang dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku (Alifia, 2021).

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara sudah kompatibel dengan peraturan atau tidak, pemerintah mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud

cerminan kinerja pengelolaan keuangan selama periode anggaran akuntansi dan pengendalian. Dalam pelaporan keuangan negara, tentu mempunyai standar akuntansi yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dan pusat yaitu penerapan akuntansi pemerintah yang berbasis akrual dengan mendasarkan pada Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menggantikan akuntansi berbasis kas ke akrual telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor serta Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor melaksanakan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangannya sejak tahun 2015 sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah.

Dalam penyusunan laporan keuangan Bappedalitbang Kabupaten Bogor tidak berbeda dengan penyusunan pemerintah daerah pada umumnya dalam penyusunan laporan keuangan. Bappedalitbang menyajikan laporan keuangan yang berisi Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada komponen laporan keuangan tentu terdapat akun aset yang termasuk komponen penting dalam sebuah operasi disuatu organisasi yaitu aset tetap. Aset tetap dibeli atau dipergunakan untuk kegiatan organisasi terutama operasional dan tidak diperuntukan untuk kegiatan investasi atau jual beli. Pada aset tetap terdapat masa manfaat yang dimiliki, yaitu harus lebih dari dua belas bulan biasanya pemerintah daerah memanfaatkan aset tetap perihal operasional atau untuk kepentingan publik (Alifia, 2021).

Penerapan SAP dalam pengelolaan aset tetap sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pencatatan aset tetap yang berkaitan dengan penyusutan, penghapusan, reklasifikasi, dan pencatatan harga perolehan (*historical cost*) yang dapat mengurangi atau menambah nilai dari aset tetap itu sendiri. Yang termasuk kedalam aset tetap ialah peralatan dan mesin, konstruksi dalam pengerjaan, jalan, irigasi, dan jaringan, tanah, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya.

Dengan demikian, penulis meninjau penerapan akuntansi aset tetap karena tertarik pada pengelolaan aset tetap di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dengan peraturan yang terkait serta mengangkat topik “Tinjauan atas Pelaksanaan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor”. KTTA ini membahas mengenai tinjauan penulis atas penerapan akuntansi aset tetap di Bappedalitbang Kabupaten Bogor yang terdiri dari pencatatan, penyajian,

penilaian, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap untuk membandingkan antara teori dengan praktik penerapannya di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Atas penyusunan latar belakang yang disajikan, penulis merumuskan masalah-masalah menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penatausahaan aset tetap pada Bappedalitbang?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi aset tetap pada Bappedalitbang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku?
3. Dasar hukum apa yang dijadikan acuan dalam proses penerapan akuntansi aset tetap di Bappedalitbang Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan berdasar pada rumusan masalah yang telah dijabarkan, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan tujuan yang baik sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penatausahaan aset tetap terkait perolehan aset tetap, pemeliharaan, penghapusan, dan pencatatan aset tetap pada Bappedalitbang Kabupaten Bogor;
2. Untuk memperoleh pemahaman terkait kesesuaian penerapan sistem akuntansi aset tetap pada Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku; dan
3. Untuk mengetahui dasar hukum apa yang digunakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Bogor sebagai landasan penerapan kebijakan akuntansi aset tetapnya.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis berusaha untuk membatasi penulisan dengan berfokus pada penggunaan data-data terkait aset tetap pada Bappedalitbang Kabupaten Bogor periode 2018-2020, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, membandingkan dokumen tersebut dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta akuntansi aset tetap akan ditinjau meliputi penilaian, klasifikasi, pengakuan penghentian aset, pengungkapan, dan penyajian aset tetap di Bappedalitbang Kabupaten Bogor.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan bisa diambil oleh pihak-pihak yang membutuhkan dari penyusunan karya tulis ini, baik secara praktis maupun teoritis, yang diantaranya:

1.3 Manfaat Praktis

A. Bagi instansi pemerintah

Penulis berharap penelitian yang disusun dapat memberikan evaluasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan instansi terkait, terutama dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap yang berdasarkan standar atau aturan.

B. Bagi akademisi

Dapat memberikan tambahan bahan referensi dalam melaksanakan pengkajian topik khususnya berkaitan mengenai masalah aset tetap yang ditinjau dalam KTTA ini dan dapat menambah wawasan bagi akademisi.

C. Bagi penulis

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan penulis untuk menjadi insan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki penulis mengenai penerapan akuntansi aset tetap yang telah dipelajari melalui perkuliahan dan literatur yang telah diperoleh dengan pengaplikasiannya pada instansi tempat diadakan penelitian.

2.3 Manfaat Teoritis

Dalam pelaksanaan penelitian atau tinjauan ini diharapkan dapat membantu dalam peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari secara teoritis pada perkuliahan dan penulis berharap penelitian atau tinjauan ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan terkait penerapan akuntansi aset tetap pada pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama penulis menyajikan gambaran umum terkait topik KTTA yang dirangkai oleh penulis. Bab ini juga menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan dalam penyusunan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua menyajikan landasan teori atas topik yang diangkat oleh penulis untuk digunakan dalam memperdalam topik yang dibahas termasuk di dalamnya seperti pengertian, ruang lingkup, klasifikasi, dan penyajian serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Penulis menggunakan landasan teori ini

untuk melakukan peninjauan antara kesesuaian pos pada akun aset tetap di Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan standar akuntansi yang berlaku.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga terdiri atas metode gambaran umum pada objek penulisan, pengumpulan data, dan pembahasan. Pada gambaran umum mengenai objek karya tulis yang akan dijelaskan ialah berisi tentang visi misi, struktur organisasi, serta fungsi singkat Bappedalitbang Kabupaten Bogor. Selain itu, pada metode pengumpulan data penulis akan menjelaskan dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara. Pada penyajian informasi, penulis akan menjelaskan hasil wawancara yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang mempunyai wewenang terkait pengelolaan aset tetap pada Bappedalitbang Kabupaten Bogor. Sedangkan pada pembahasan, akan menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disajikan oleh penulis terkait tinjauan antara kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada objek karya tulis yaitu Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan standar akuntansi yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Selanjutnya, pada bab simpula merupakan bagian penutup dari KTTA penulis yang memuat simpulan dan saran oleh penulis atas uraian pada bab-bab sebelumnya yaitu terkait praktik akuntansi aset tetap pada Bappedalitbang Kabupaten Bogor. Simpulan yang dibuat oleh penulis akan bersifat membangun untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Bappedalitbang Kabupaten Bogor.